

ANALISIS PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DALAM PELAPORAN KEUANGAN DAERAH DI KECAMATAN DAU KABUPATEN MALANG

Fitriani Jelita¹, Klara Kumalasari²

^{1,2} Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Malang

^{1,2} Program Studi Administrasi Publik

Email: fitryjelita46@gmail.com

Abstrak

Pelaporan keuangan daerah merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah yang memerlukan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) untuk menjamin keandalan informasi keuangan. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan SPIP dalam pelaporan keuangan daerah di Kecamatan Dau Kabupaten Malang serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap Camat, Sekretaris Kecamatan selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Bendahara Pengeluaran, dan Staf Sekretariat. Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa SPIP telah diterapkan melalui pengendalian preventif, detektif, dan korektif yang mendukung keandalan pelaporan keuangan daerah. Faktor pendukung meliputi komitmen pimpinan, koordinasi, kompetensi aparatur, dan pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), sedangkan faktor penghambat meliputi *human error*, perubahan regulasi, kendala teknis SIPD, serta keterbatasan sumber daya manusia. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penerapan SPIP berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pelaporan keuangan, meskipun penguatan dokumentasi pengawasan masih diperlukan.

Kata kunci: *Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, SPIP, pengendalian internal, pelaporan keuangan daerah.*

Abstract

Regional financial reporting represents the government's accountability in managing public resources and requires an effective Government Internal Control System (SPIP) to ensure reliable financial information. This study aims to analyze the implementation of SPIP in regional financial reporting at Dau District, Malang Regency, and to identify its supporting and inhibiting factors. This study employed a qualitative descriptive approach. Data were collected through observation, interviews, and documentation involving the Head of Dau District, the District Secretary as the Financial Administration Officer (PPK), the Expenditure Treasurer, and Secretariat staff.

Data were analyzed using the interactive model of Miles, Huberman, and Saldaña, consisting of data collection, data condensation, data display, and conclusion drawing. The findings indicate that SPIP has been implemented through preventive, detective, and corrective controls that support the reliability of regional financial reporting. Supporting factors include leadership commitment, coordination, employee competence, and the utilization of the Regional Government Information System (SIPD), while inhibiting factors include human error, regulatory changes, SIPD technical constraints, and limited human resources. The study concludes that SPIP contributes to improving the quality of regional financial reporting, although stronger documentation of supervisory activities remains necessary.

Keywords: *Government Internal Control System, SPIP, internal control, regional financial reporting*

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) menuntut pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien. Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan sumber daya publik, laporan keuangan daerah harus disusun secara andal serta didukung oleh sistem pengendalian internal yang memadai untuk meminimalkan risiko kesalahan maupun penyimpangan (Mardiasmo, 2018). Oleh karena itu, pemerintah menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 sebagai instrumen untuk memberikan keyakinan memadai terhadap tercapainya tujuan organisasi, khususnya dalam mewujudkan keandalan pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi kegiatan, pengamanan aset negara, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Dalam penelitian ini, penerapan SPIP dianalisis menggunakan teori Romney dan Steinbart (2015) yang mengelompokkan pengendalian internal ke dalam tiga bentuk, yaitu pengendalian preventif, detektif, dan korektif. Ketiga bentuk pengendalian tersebut digunakan untuk menganalisis mekanisme pencegahan, pendeteksian, dan tindak lanjut terhadap kesalahan dalam proses pelaporan keuangan daerah.

Berdasarkan hasil observasi awal di Kecamatan Dau Kabupaten Malang, pengawasan internal dalam pelaporan keuangan masih dilakukan melalui audit lisan yang belum sepenuhnya didukung dokumentasi tertulis. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa mekanisme pengendalian telah diterapkan, namun dokumentasi hasil pengawasan masih perlu diperkuat agar mendukung akuntabilitas serta tindak lanjut pengendalian secara lebih optimal.

Penelitian mengenai penerapan SPIP telah dilakukan pada berbagai tingkat pemerintahan. Marisca et al. (2025) menunjukkan bahwa efektivitas pengendalian internal dipengaruhi oleh komitmen pimpinan, kompetensi aparatur, dan koordinasi dalam pengelolaan keuangan. Siringoringo et al. (2023) menjelaskan bahwa penerapan sistem pengendalian internal berkontribusi terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Selain itu, Nazaruddin et al. (2023) menegaskan bahwa kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan kepatuhan terhadap prosedur menjadi faktor yang memengaruhi efektivitas pengendalian internal.

Meskipun demikian, sebagian besar penelitian tersebut berfokus pada pemerintah daerah secara umum maupun pemerintahan desa, sedangkan kajian

mengenai penerapan SPIP pada tingkat kecamatan masih relatif terbatas. Padahal, kecamatan memiliki peran penting dalam pengelolaan administrasi dan pelaporan keuangan daerah sehingga implementasi pengendalian internal pada tingkat ini perlu dikaji lebih lanjut.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam pelaporan keuangan daerah di Kecamatan Dau Kabupaten Malang berdasarkan perspektif pengendalian preventif, detektif, dan korektif menurut Romney dan Steinbart (2015), serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat penerapannya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris mengenai implementasi SPIP pada tingkat kecamatan yang masih terbatas dalam penelitian sebelumnya.

TINJAUAN PUSTAKA

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan proses yang dilaksanakan secara berkelanjutan oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai terhadap tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008.

Dalam pengelolaan keuangan daerah, SPIP berfungsi sebagai mekanisme pengendalian untuk mengurangi risiko, mencegah penyimpangan, dan mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Unsur SPIP meliputi lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan pengendalian intern yang menjadi dasar penerapan pengendalian pada instansi pemerintah.

Pengendalian Internal dalam Pelaporan Keuangan Daerah

Pelaporan keuangan daerah merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas pengelolaan sumber daya publik. Kualitas laporan keuangan dipengaruhi oleh penerapan pengendalian internal yang mampu memastikan setiap proses pengelolaan keuangan dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku. Menurut Mardiasmo (2018), akuntabilitas sektor publik tidak hanya diukur dari penyajian laporan keuangan, tetapi juga dari proses pengelolaannya yang transparan dan sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, pengendalian internal menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kualitas pelaporan keuangan daerah dan dijadikan landasan analisis dalam penelitian ini.

Pengendalian Internal

Romney dan Steinbart (2015) mendefinisikan pengendalian internal sebagai serangkaian kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk melindungi aset, menjaga keandalan informasi, meningkatkan efektivitas operasional, serta memastikan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Dalam penelitian ini, pengendalian internal dianalisis melalui tiga bentuk utama, yaitu pengendalian preventif untuk mencegah kesalahan, pengendalian detektif untuk menemukan kesalahan setelah aktivitas berlangsung, dan pengendalian korektif untuk memperbaiki serta mencegah terulangnya kesalahan. Ketiga bentuk pengendalian tersebut digunakan sebagai indikator analisis dalam mengkaji penerapan SPIP di Kecamatan Dau Kabupaten Malang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk menganalisis penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam pelaporan keuangan daerah di Kecamatan Dau Kabupaten Malang.

Penelitian dilaksanakan di Kantor Kecamatan Dau Kabupaten Malang yang dipilih secara purposif karena memiliki peran dalam pengelolaan administrasi dan pelaporan keuangan daerah. Selain itu, hasil observasi awal menunjukkan adanya praktik pengawasan internal melalui audit

lisan yang belum sepenuhnya didukung dokumentasi tertulis sehingga relevan dengan fokus penelitian.

Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling* yang terdiri atas Camat Kecamatan Dau, Sekretaris Kecamatan selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Bendahara Pengeluaran, dan Staf Sekretariat Kecamatan Dau. Keempat informan dipilih karena terlibat langsung dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan keuangan daerah.

Data penelitian diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Keabsahan data diuji menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik untuk meningkatkan kredibilitas hasil penelitian.

Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2014) yang meliputi pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah serta teori Romney dan Steinbart (2015) mengenai pengendalian preventif, detektif, dan korektif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam Pelaporan Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam pelaporan keuangan daerah di Kecamatan Dau Kabupaten Malang telah dilaksanakan melalui berbagai mekanisme pengendalian yang mendukung keandalan pelaporan keuangan. Analisis penerapan SPIP mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 serta teori Romney dan Steinbart (2015) yang mengelompokkan pengendalian internal ke dalam pengendalian preventif, detektif, dan korektif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga bentuk pengendalian tersebut telah diterapkan pada setiap tahapan pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah, mulai dari perencanaan kegiatan, pelaksanaan anggaran, pemeriksaan administrasi, penyusunan laporan keuangan, hingga tindak lanjut terhadap kesalahan yang ditemukan. Penerapan tersebut menunjukkan bahwa SPIP tidak hanya berfungsi sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga sebagai mekanisme untuk menjaga keandalan informasi keuangan, mengurangi risiko kesalahan administrasi, serta meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Pengendalian Preventif dalam Pelaporan Keuangan Daerah

Pengendalian preventif merupakan mekanisme yang dilakukan sebelum aktivitas berlangsung untuk mencegah terjadinya kesalahan maupun penyimpangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kecamatan Dau menerapkan pengendalian preventif melalui pembagian tugas dan tanggung jawab, koordinasi internal, mekanisme otorisasi berjenjang, evaluasi sebelum pelaksanaan kegiatan, serta pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

Pembagian tugas dilakukan sesuai kewenangan masing-masing aparatur yang terlibat dalam pengelolaan keuangan daerah. Setiap aparatur memiliki tanggung jawab yang berbeda dalam proses administrasi, pelaksanaan kegiatan, pemeriksaan dokumen, hingga penyusunan laporan keuangan. Kondisi tersebut mencerminkan penerapan prinsip *segregation of duties* sebagaimana dikemukakan oleh Romney dan Steinbart (2015), sehingga mampu mengurangi risiko kesalahan maupun penyalahgunaan kewenangan.

Selain pembagian tugas, pengelolaan keuangan di Kecamatan Dau juga menerapkan mekanisme otorisasi berjenjang. Setiap dokumen dan transaksi keuangan harus melalui proses

pemeriksaan serta persetujuan pejabat yang berwenang sebelum diproses lebih lanjut sebagai bentuk pengendalian terhadap risiko administrasi.

Pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) turut memperkuat pengendalian preventif karena membantu memastikan proses pencatatan dan penginputan data dilakukan sesuai prosedur, meningkatkan konsistensi pengelolaan informasi keuangan, serta meminimalkan kemungkinan terjadinya kesalahan administrasi sejak tahap awal.

Berdasarkan teori Romney dan Steinbart (2015), penerapan tersebut menunjukkan bahwa pengendalian preventif di Kecamatan Dau telah berfungsi mencegah terjadinya kesalahan sebelum memengaruhi kualitas laporan keuangan dan sejalan dengan prinsip kegiatan pengendalian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 melalui pembagian kewenangan, prosedur yang jelas, dan pengendalian terhadap risiko organisasi.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Siringoringo et al. (2023) yang menyatakan bahwa penerapan sistem pengendalian internal berkontribusi terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Pada Kecamatan Dau, kondisi tersebut tercermin melalui pembagian tugas, mekanisme otorisasi, koordinasi antarpegawai, serta

pemanfaatan SIPD yang mendukung keandalan pelaporan keuangan.

Pengendalian Detektif dalam Pelaporan Keuangan Daerah

Pengendalian detektif dilakukan untuk menemukan kesalahan atau ketidaksesuaian setelah suatu aktivitas berlangsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kecamatan Dau menerapkannya melalui pemeriksaan dokumen, rekonsiliasi, evaluasi berkala, pemeriksaan fisik (*opname*), validasi data melalui SIPD, serta pemeriksaan administrasi oleh pimpinan.

Pemeriksaan dokumen dan rekonsiliasi dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara transaksi keuangan dengan dokumen pendukung sehingga perbedaan yang ditemukan dapat segera ditindaklanjuti. Selain itu, evaluasi berkala dan pemanfaatan SIPD membantu aparatur memantau ketepatan data serta mengidentifikasi kendala dalam proses pelaporan keuangan.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa audit lisan masih digunakan sebagai salah satu bentuk pengawasan internal oleh pimpinan. Mekanisme tersebut memungkinkan penyampaian informasi mengenai perkembangan kegiatan dan permasalahan secara cepat. Dalam perspektif Romney dan Steinbart (2015), audit lisan dapat dipahami sebagai bentuk pengendalian detektif karena berfungsi

menemukan permasalahan setelah aktivitas berlangsung. Namun demikian, dokumentasi hasil pengawasan masih perlu diperkuat agar setiap temuan memiliki bukti administratif yang mendukung proses evaluasi dan tindak lanjut pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008.

Pengendalian Korektif dalam Pelaporan Keuangan Daerah

Pengendalian korektif merupakan tindakan yang dilakukan setelah ditemukan kesalahan atau ketidaksesuaian dengan tujuan memperbaiki permasalahan serta mencegah terulangnya kesalahan pada periode berikutnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kecamatan Dau menerapkan pengendalian korektif melalui perbaikan dokumen administrasi, pembaruan data pada SIPD, koordinasi dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), pemberian arahan oleh pimpinan, serta tindak lanjut terhadap hasil evaluasi dan pemeriksaan.

Apabila ditemukan kesalahan dalam pelaporan keuangan, aparatur melakukan pemeriksaan ulang dan memperbaiki dokumen sebelum laporan disampaikan kepada pihak terkait. Koordinasi dengan BPKAD dilakukan apabila terdapat kendala administrasi, perbedaan data, maupun permasalahan teknis selama proses pelaporan.

Selain melakukan perbaikan administratif, pimpinan memberikan arahan kepada aparatur untuk meningkatkan ketelitian dan kepatuhan terhadap prosedur pengelolaan keuangan. Berdasarkan teori Romney dan Steinbart (2015), pengendalian korektif berperan dalam memperbaiki kelemahan sistem sekaligus meningkatkan efektivitas pengendalian internal. Dengan demikian, penerapan pengendalian korektif di Kecamatan Dau telah mendukung perbaikan berkelanjutan dalam penerapan SPIP.

Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Nazaruddin et al. (2023) yang menunjukkan bahwa efektivitas pengendalian internal dipengaruhi oleh kemampuan organisasi dalam menindaklanjuti setiap permasalahan yang ditemukan. Pada Kecamatan Dau, tindak lanjut tersebut diwujudkan melalui perbaikan dokumen administrasi, koordinasi dengan BPKAD, dan pemberian arahan kepada aparatur untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan.

Analisis SPIP Berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2008 dan Romney & Steinbart (2015)

Berdasarkan hasil penelitian, penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Kecamatan Dau Kabupaten Malang telah mencerminkan prinsip-prinsip pengendalian internal sebagaimana

diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 dan teori Romney dan Steinbart (2015). Pengendalian preventif diterapkan melalui pembagian tugas, mekanisme otorisasi, koordinasi, evaluasi, serta pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) untuk mengurangi risiko kesalahan sebelum memengaruhi kualitas pelaporan keuangan. Pengendalian detektif dilakukan melalui pemeriksaan dokumen, rekonsiliasi, evaluasi berkala, validasi data, dan audit lisan oleh pimpinan untuk mengidentifikasi kesalahan selama proses pelaporan keuangan. Sementara itu, pengendalian korektif diwujudkan melalui perbaikan dokumen administrasi, pembaruan data, koordinasi dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), serta tindak lanjut terhadap hasil evaluasi dan pemeriksaan. Ketiga bentuk pengendalian tersebut saling melengkapi dalam mendukung efektivitas penerapan SPIP di Kecamatan Dau.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SPIP di Kecamatan Dau tidak hanya berorientasi pada kepatuhan terhadap peraturan, tetapi juga pada upaya meningkatkan keandalan pelaporan keuangan, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Meskipun demikian, dokumentasi hasil pengawasan masih perlu diperkuat agar proses evaluasi

dan tindak lanjut dapat dilaksanakan secara lebih optimal sesuai prinsip akuntabilitas.

Selain menunjukkan kesesuaian dengan teori Romney dan Steinbart (2015) serta Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, penelitian ini memberikan kontribusi empiris mengenai implementasi SPIP pada tingkat kecamatan yang masih relatif terbatas dalam penelitian sebelumnya. Berbeda dengan organisasi perangkat daerah yang memiliki struktur pengendalian lebih kompleks, penerapan SPIP di Kecamatan Dau lebih banyak mengandalkan koordinasi langsung, komunikasi antarpegawai, audit lisan oleh pimpinan, serta mekanisme administrasi yang sederhana namun tetap mampu mendukung keandalan pelaporan keuangan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa penerapan SPIP dapat disesuaikan dengan karakteristik organisasi tanpa mengurangi prinsip-prinsip dasar pengendalian internal.

Faktor Pendukung dan Penghambat Penerapan SPIP

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan SPIP di Kecamatan Dau didukung oleh komitmen pimpinan, pembagian tugas yang jelas, koordinasi antarpegawai, pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), evaluasi dan rekonsiliasi secara berkala, serta peningkatan kompetensi aparatur melalui bimbingan teknis. Faktor-faktor

tersebut menunjukkan bahwa efektivitas pengendalian internal tidak hanya ditentukan oleh prosedur formal, tetapi juga oleh kualitas sumber daya manusia, komunikasi, dan dukungan teknologi informasi.

Di sisi lain, penelitian ini juga menemukan beberapa faktor yang menghambat penerapan SPIP, yaitu *human error*, perubahan regulasi, kendala teknis pada SIPD, keterlambatan dokumen administrasi, serta keterbatasan sumber daya manusia. Berbagai kendala tersebut berpotensi memengaruhi ketepatan waktu dan kualitas pelaporan keuangan apabila tidak segera ditindaklanjuti.

Temuan penelitian ini sejalan dengan Nazaruddin et al. (2023) yang menyatakan bahwa efektivitas pengendalian internal dipengaruhi oleh kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, serta kepatuhan terhadap prosedur. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas aparatur, penguatan koordinasi, evaluasi secara berkala, dan optimalisasi pemanfaatan SIPD menjadi upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan efektivitas penerapan SPIP di Kecamatan Dau.

Secara keseluruhan, penerapan SPIP di Kecamatan Dau telah berjalan dengan baik karena didukung oleh komitmen organisasi dan mekanisme pengendalian yang memadai. Meskipun demikian, berbagai hambatan yang masih ditemukan

menunjukkan perlunya penyempurnaan pengendalian internal secara berkelanjutan agar kualitas pelaporan keuangan daerah semakin optimal.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam pelaporan keuangan daerah di Kecamatan Dau Kabupaten Malang telah dilaksanakan melalui pengendalian preventif, detektif, dan korektif sesuai dengan prinsip Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 serta teori Romney dan Steinbart (2015).

Pengendalian preventif diterapkan melalui pembagian tugas, mekanisme otorisasi, koordinasi, evaluasi, dan pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Pengendalian detektif dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen, rekonsiliasi, validasi data, evaluasi berkala, dan audit lisan oleh pimpinan, sedangkan pengendalian korektif diwujudkan melalui perbaikan dokumen administrasi, koordinasi dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), serta tindak lanjut terhadap hasil evaluasi.

Keberhasilan penerapan SPIP didukung oleh komitmen pimpinan, kompetensi aparatur, koordinasi, dan pemanfaatan SIPD, sedangkan kendala yang masih dihadapi meliputi *human error*, perubahan regulasi, kendala teknis sistem,

keterlambatan dokumen administrasi, dan keterbatasan sumber daya manusia. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penerapan SPIP berkontribusi dalam meningkatkan keandalan pelaporan keuangan daerah, meskipun penguatan dokumentasi pengawasan dan peningkatan kapasitas aparatur masih diperlukan untuk mendukung efektivitas pengendalian intern secara berkelanjutan.

SARAN

Kecamatan Dau Kabupaten Malang perlu memperkuat dokumentasi hasil pengawasan agar setiap temuan dapat ditindaklanjuti secara lebih sistematis dan terdokumentasi. Selain itu, peningkatan kompetensi aparatur melalui pelatihan yang berkelanjutan serta optimalisasi pemanfaatan SIPD perlu terus dilakukan untuk mendukung efektivitas penerapan SPIP dalam pelaporan keuangan daerah.

Penelitian selanjutnya disarankan mengembangkan kajian mengenai implementasi SPIP pada tingkat kecamatan di wilayah lain atau menggunakan pendekatan kuantitatif maupun *mixed methods* sehingga diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas pengendalian internal pada sektor pemerintahan.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2023). Ikhtisar Hasil

Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2023. Jakarta: BPK RI.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang. (2024). Kecamatan Dau Dalam Angka 2024. Malang: Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang.

Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.

Marisca, C., & Mulyono, A. (2025). Pengaruh Sistem Keuangan, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan Kompetensi Aparatur Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Keuangan dan Manajemen Terapan*, 4(2), 85–97.

Retrieve from

<https://ejournals.com/ojs/index.php/jkmt>.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

Nazaruddin, I., Nirmala, N. A., Az-Zahro, S. F., & Ratifah, I. (2023). The Mediation Role of Internal Control Implementation in Village Financial Accountability Performance. *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer*, 15(2), 120–134.

Retrieve

from

<https://journal.unpas.ac.id/index.php/jrak/article/view/6431>

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Romney, M. B., & Steinbart, P. J. (2015). *Accounting Information Systems*

- (13th ed.). Harlow, England: Pearson Education Limited.
- Siringoringo, V. R., Fadhilah, U. A., Rizal, M., & Ervinasari, B. (2023). Peran Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis*, 11(1), 38–46. Retrieeve from <https://ejournal.pkmpi.org/index.php/ijess/article/view/35>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.